

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W, 2008, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga Pustaka Pelajar, Bandung;
- Djafar Saidi, Muhammad, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, *Pedoman Pasal 22 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, KPPU, Jakarta;
- Ramli, Samsul, 2014, *Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media, Jakarta;
- Tuanakotta, Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta;
- BusinessDictionary.com, Contractor, <http://www.businessdictionary.com/definition/contractor.html>, diakses tanggal 28 Mei 2016;
- LIPBI INDONESIA, Dampak Persekongkolan Dalam Tender, [http://www.kompasiana.com/lipbi\\_indonesia/dampak-persekongkolan-dalam-tender](http://www.kompasiana.com/lipbi_indonesia/dampak-persekongkolan-dalam-tender), diakses 09 Maret 2016;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres 54 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 90/PID.SUS/TPK/2104/PN.JKT.PST perihal putusan terhadap terdakwa Ramadhani Ismy., 15 Desember 2014;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor:

86/PID.SUS/TPK/2104/PN.JKT.PST perihal putusan terhadap terdakwa

Heru Sulaksono., 22 Desember 2014;

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor: 11/PID/TPK/2015/PT.DKI perihal

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada

Komisi Pemberantasan Korupsi., 07 Maret 2015;

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :

28a/HP/XVIII/8/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pembangunan

Dermaga Sabang Pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Dan

Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2004 S.D. 2011., 05 Agustus

2014;